

## **USULAN PENELITIAN INTERNAL**



### **ANALISIS PENERIMAAN DALAM NEGERI DARI HASIL PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA**

Oleh :

Dibiayai oleh:  
Diva Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI  
2022**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN .....	iii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	3
1.6. Target luaran yang ingin dicapai .....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Kerangka Teori .....	5
2.2. Penelitian Terdahulu .....	10
2.3. Kerangka Penelitian .....	11
2.4. Hipotesis Penelitian .....	12
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	13
3.2. Sumber Data Penelitian.....	13
3.3. Metode Analisis Data.....	13
<b>BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1. Anggaran Biaya .....	16
4.2. Jadwal Penelitian .....	17
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah potensi tersebut sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengelolaan SDA yang saat ini belum maksimal dan belum sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan fenomena tersebut penting diketahui terlebih dahulu bagaimana pertumbuhan, kontribusi serta pengaruh penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap penerimaan negara bukan pajak di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data rencana serta realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan data penerimaan negara bukan pajak di Indonesia. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif melalui analisis kontribusi dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian diharapkan akan data diketahui pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam Indonesia serta kontribusi dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara bukan pajak di Indonesia.

**Kata Kunci:** *APBN, Penerimaan, Realisasi, PNBP.*

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara menjaga dan melestarikannya. Sumber daya alam merupakan awal atau landasan dasar dalam hal pembangunan nasional yang berkelanjutan guna memberikan manfaat bagi lingkungan hidup serta sosial budaya bagi masyarakat.

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, karunia tersebut tersirat secara langsung ketika Indonesia menjadi sebuah Negara yang saat ini memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia dan keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di dalamnya.<sup>1</sup> Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara baik dan benar dikarenakan sumber daya alam di Indonesia merupakan sektor paling penting untuk kekayaan bangsa terutama menunjang dalam segi pendapatan Negara serta dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dan diatur di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Negara Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga perlu melakukan perencanaan yang baik dalam pengelolaannya sehingga bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang cukup, dan sumber dana tersebut berasal dari pengelolaan penerimaan negara seperti penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan hibah. Susilo,(2016) mengemukakan penerimaan pemerintah dari pajak digunakan untuk pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan peran masyarakat dalam pembangunan terus ditingkatkan dengan

meningkatkan kesadaran akan kepatuhan pajak. Sumber penerimaan pemerintah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) salah satunya berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam, karena usaha pengelolaan SDA merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembangunan yang secara umum dilakukan untuk mendorong kesejahteraan hidup masyarakat.

Potensi sumberdaya alam Indonesia yang sangat besar saat ini belum dikelola dengan baik dan kontribusinya masih belum secara maksimal bagi pendapatan negara. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, realisasi penerimaan hasil pengelolaan potensi sumberdaya alam Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar Rp.154.895 triliun, selanjutnya turun menjadi Rp. 97.225 Triliun pada tahun 2020 dan di tahun 2021 meningkat kembali menjadi Rp.149.489 Triliun. Penurunan realisasi penerimaan yang terjadi tahun 2020 disebabkan Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang mewabah. Secara persentase kontribusi hasil pengelolaan potensi sumberdaya alam Indonesia bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia kondisinya masih belum maksimal dimana pada tahun 2019 hanya sebesar 37,87%, tahun 2020 sebesar 28,27 % dan tahun 2021 sebesar 32,60 %.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat menarik untuk diteliti bagaimana efektivitas pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia sehingga realisasi dari hasil pengelolaan sumberdaya alam Indonesia tersebut dapat terus meningkat selanjutnya akan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertumbuhan pendapatan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia dari aspek rencana penerimaan dan realisasi ?

2. Bagaimana kontribusi realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak di Indonesia.?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan pendapatan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia dari aspek rencana penerimaan dan realisasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapatkan menjadi informasi terbaru bagi semua stake holder baik itu akademisi, peneliti serta pemerintahan mengenai efektivitas pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia khususnya kontribusi serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan dalam negeri Indonesia.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi serta pengaruh hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap penerimaan negara bukan pajak di Indonesia dari aspek rencana pendapatan serta realisasi penerimaan. Penelitian ini menggunakan data *kualitatif*, dimana analisis penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif, analisis kontribusi dan *Simple Linear Regression*.

### 1.6. Target luaran yang ingin dicapai

Target luaran yang ingin dicapai dapat digambarkan seperti pada pada Tabel 1 berikut yang sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian akan dilakukan.

Tabel. 1.  
Rencana Target Capaian Penelitian Tahunan

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS1
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal <sup>2)</sup>	- Nasional Terakreditasi - Lokal	√ √	tidak ada tidak ada	<i>published</i> <i>published</i>
2	Artikel ilmiah dimuat diprosiding <sup>3)</sup>	- Nasional - Lokal	tidak ada tidak ada	√ √	tidak ada tidak ada
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah <sup>4)</sup>	- Nasional - Lokal	tidak ada tidak ada	√ √	dilaksanakan dilaksanakan
4	<i>Visiting Lecturer</i> <sup>5)</sup>	Internasional	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) <sup>6)</sup>	Paten Paten sederhana Hak Cipta Merek dagang Rahasia dagang Desain Produk Industri Indikasi Geografis Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada	tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada	tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada
6	Teknologi Tepat Guna <sup>7)</sup>		tidak ada	tidak ada	tidak ada
7	Model/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial <sup>8)</sup>		tidak ada	√	Penerapan
8	Bahan Ajar <sup>9)</sup>		tidak ada	draf	editing
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) <sup>10)</sup>		tidak ada	tidak ada	tidak ada

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Sumber Penerimaan Negara**

Pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa memerlukan dana pembiayaan yang sangat besar dan berlangsung secara bertahap. Dalam hal ini pemerintah berupaya menghimpun sumber-sumber penerimaan Negara yaitu salah satunya penerimaan Negara dari sektor Pajak. Menurut Basri, (2005) Penerimaan Negara diartikan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah dan mencetak uang. Penerimaan dari sektor Pajak ini sendiri dapat digunakan untuk sumber keuangan Negara dan keuangan daerah yang nantinya berfungsi sebagai dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan. Keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak-hak tersebut.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu meliputi : a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan Negara. d. Pengeluaran Negara. e. Penerimaan Daerah. f. Pengeluaran Daerah. g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai



dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum. i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Negara juga mempunyai kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sebagai berikut : a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan, dan perairan. b. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesanan.

### **2.1.2. Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara, Maka dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi mengenai rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari instansi Pemerintah sebagai masukan bagi Menteri untuk penetapan kebijakan di bidang PNBP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengelolaan keuangan negara, sehingga dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini.

Hastuti ,(2018) Pengertian dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, tidak hanya dalam arti formal melainkan juga dalam arti material. Dengan demikian, Undang-undang Perpajakan harus memuat norma-norma yang mengatur tentang perpajakan, sedangkan Undang-undang PNBP juga harus memuat norma-norma yang mengatur tentang PNBP. Berbeda dengan APBN sebagai undang-undang dalam

arti formal yang hanya mengikat pemerintah dan berlaku satu kali (norma hukumnya bersifat individual-konkret dan berlaku sekali-selesai (einmalig). Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang PNBPN harus memuat norma yang berlaku mengikat secara umum dan terus menerus (norma hukumnya bersifat umum-abstrak dan berlaku terus-menerus (dauerhaftig).

Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Secara umum PNBPN dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

#### 1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan sumber daya alam, terdiri atas pendapatan sumber daya alam (SDA) migas yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas kerjasama pengelolaan sektor hulu migas dan SDA non-migas yang diperoleh dari hasil pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

#### 2. PendapatanBagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pendapatan ini Merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (return on equity) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio).Pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan dan nonperbankan.

#### 3. PNBPN Lainnya

PNBPN lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat.Pungutan dilakukan oleh instansi pemerintah atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian/Lembaga tertentu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan.Selain itu, jenis dan tarif PNBPN BLU tidak ditetapkan melalui PP melainkan Peraturan Menteri Keuangan.

PNBP yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga (tidak termasuk pendapatan Badan Layanan Umum) dapat dikelompok menjadi 2 (dua), yaitu:

a. PNBP Umum

Setiap kementerian negara/lembaga pada dasarnya mempunyai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat umum yaitu PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. PNBP umum merupakan PNBP yang berlaku umum di semua kementerian negara/lembaga. PNBP umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP antarlain: 1. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara. 2. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara. 3. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro). 4. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan). 5. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. 6. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. 7. Penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran lalu.

b. PNBP Fungsional

Selain PNBP Umum terdapat PNBP di kementerian/lembaga yaitu PNBP yang bersifat fungsional. PNBP yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar kementerian negara/lembaga, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga.

### **2.1.3. Konsep Sumber Daya**

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri (Fauzi, 2004).

Dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. Ensiklopedia *Webster* yang dikutip oleh Fauzi pada tahun 2004, misalnya mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai : (1) kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, (2) sumber persediaan, penunjang atau bantuan, (3) sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Rees (1990) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya yang kedua adalah harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004).

Dengan demikian dalam pengertian ini definisi sumber daya terkait dengan kegunaan (*usefulness*), baik untuk masa kini maupun mendatang bagi umat manusia. Selain dua kriteria di atas, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber

dayadimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan.

Pengertian sumber daya sendiri dalam ilmu ekonomi sudah dikenal sejak beberapa abad lalu. Ketika Adam Smith, bapak ekonomi menerbitkan buku "*Wealth of Nation*"-nya pada tahun 1776, konsep sumber daya sudah digunakan dalam kaitannya dengan proses produksi. Dalam pandangan Adam Smith, sumber daya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan *output*. Pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Dalam literatur sering dinyatakan bahwa sumber daya memiliki nilai "*intrinsic*". Nilai *intrinsic* adalah nilai yang terkandung dalam sumber daya, terlepas apakah sumber daya tersebut dikonsumsi atau tidak, atau lebih ekstrem lagi, terlepas dari apakah manusia ada atau tidak. Dalam ilmu ekonomi konvensional, nilai *intrinsic* ini sering diabaikan sehingga menggunakan alat ekonomi konvensional semata untuk memahami pengelolaan sumber daya alam sering tidak mengenai sasaran yang tepat.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Irfan Nur Rachman dalam penelitiannya yang berjudul Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945 tahun 2016 mengemukakan Negara Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan penanaman modal asing terutama sektor pertambangan, selain sektor kehutanan, dan pengelolaan sumber daya air. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan negara kita dalam mengelola sumber daya alam, baik dari aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, dan aspek teknologi. Akibatnya sumber daya alam yang kita miliki tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ironisnya, negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bukanlah dari hasil pengelolaan sumber daya alam, melainkan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia perlu

memerhatikan Pasal 33 UUD 1945 yang memuat dasar politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai.

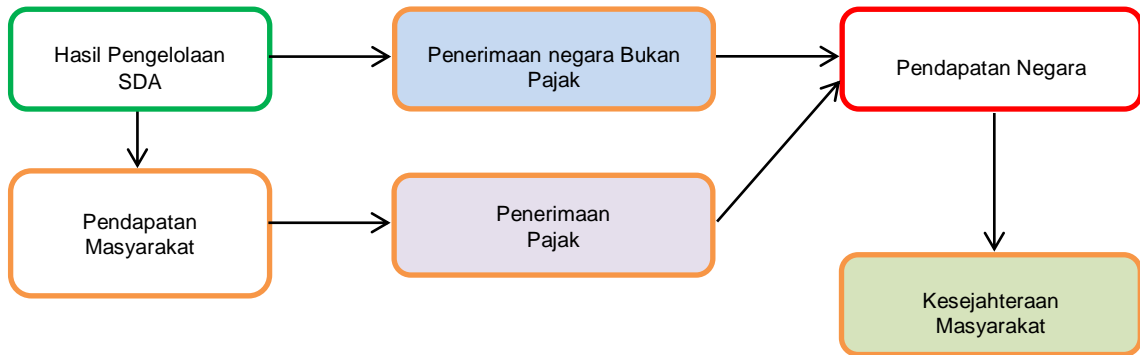
Badriyyah Djula berjudul Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi dimana yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan mengetahui apakah yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis dengan bentuk studi korelasi dan regresi. Hal ini dimasukkan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, selanjutnya mengadakan analisis terhadap data-data hasil penelitian: 1. dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi  $\hat{Y} = 64,39 + 0,9x$ , yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan atau setiap kenaikan setiap satu satuan pada variabel kerja maka diikutsertakan oleh pertambahan sebesar 0,9 satuan pada variabel kinerja karyawan. Regresi antara variabel sumber daya alam (sda) dan pertumbuhan ekonomi berbentuk regresi linier; 2. hasil analisis data untuk perhitungan koefisien korelasi diperoleh harga  $r = 0,98$  dengan indeks determinasinya adalah 98%. Hal ini berarti bahwa sumber daya alam (SDM) memberikan hubungan sebesar 98% terhadap pertumbuhan ekonomi; 3. hasil analisis data untuk pengujian hipotesis, dalam perhitungan ini memperoleh hasil perhitungan dari variabel sumber daya alam (x) dan variabel perhitungan ekonomi (Y) pada uji statistik uji t memperoleh harga t sebesar 4,00 pengujian ini dilakukan pada taraf nyata  $\alpha = 0,01$  dan tingkat keperluannya pada 0,95.

### **2.3. Kerangka Penelitian**

Potensi sumberdaya alam Indonesia saat ini sangatlah besar, apabila potensi tersebut dapat dikelola secara baik maka kontribusinya juga akan semakin besar bagi penerimaan negara bukan pajak, pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gambaran keterkaitan antar variabel yang dianalisis terlihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar.2. 1

Kerangka Penelitian/ Model Penelitian



#### 2.4. Hipotesis Penelitian

H1 : Realisasi pendapatan pengelolaan sumberdaya alam berpengaruh positif terhadap realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak Di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian kuantitatif, dimana kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023, dengan menggunakan datasekunder berupa datarealisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia dari aspek rencana pendapatan dan realisasi.

#### **3.2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian diperoleh dari publikasi berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan beberapa sumber pendukung lainnya.

#### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kuantitatif dengan tahapan-tahapan yang meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya pengujian statistik yang dilakukan berupa :

##### *1. Analisis Deskriptif*

Analisis deskriptif pada penelitian ini untuk menganalisis realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak di Indonesia dari aspek rencana pendapatan dan realisasi. Selanjutnya data tersebut digambarkan dengan bentuk tabel dan grafik. Analisis deskriptif adalah cara untuk menggambarkan data yang terkumpul karena tanpa ada niat membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyon, 2013).



## 2. Analisis Kuantitatif

### a. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan atau diberikan dari realisasi penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam terhadap penerimaan negara bukan pajak di Indonesia. Selanjutnya untuk menghitung kontribusi rencana pendapatan serta realisasi pengelolaan sumberdaya alam terhadap penerimaan negara bukan pajak di Indonesia dengan menggunakan persamaan  $Kontribusi = \frac{Rencana / realisasi Hasil penegelolaan SDA}{Penerimaan / realisasi penerimaan negara bukan pajak} \times 100$

Tabel 3.1  
Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,20% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

### b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secaralinier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen (Y) apabila nilai variabel independen (X) mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Adapun bentuk persamaan dari regresi linier sederhana ini adalah  $Y = a + b X + \varepsilon$  dimana Y = Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Indonesia (nilai yang diprediksikan), a = Konstanta (apabila nilai X = 0), b = Koefisien regresi sederhana, X = penerimaan hasil pengelolaan sumberdaya alam (nilai variabel independen) sedangkan  $\varepsilon$  = *standard error*.

Selanjutnya **Analisis Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)** digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat). Jadi koefisien determinasi adalah mengukur seberapa jauh kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan X mempengaruhi, serta **Uji Hipotesis (Uji t)** digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak pada masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Langkah-langkah untuk uji hipotesis adalah sebagai berikut: 1. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh antara realisasi pendapatan pengelolaan sumberdaya alam terhadap realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak Di Indonesia

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh antara realisasi pendapatan pengelolaan sumberdaya alam terhadap realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak Di Indonesia

dengan Kaidah pengujian hipotesis

- a. Jika  $t\text{-Sig} > 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, hal ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara realisasi pendapatan pengelolaan sumberdaya alam (X) terhadap realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak Di Indonesia (Y).
- b. Jika  $t\text{-sig} < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, hal ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara realisasi pendapatan pengelolaan sumberdaya alam (X) terhadap realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak Di Indonesia (Y).

## BAB IV

### BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

#### 4.1. Anggaran Biaya

Anggaran penelitian mengacu pada Pedoman penyusunan Anggaran yang berlaku, besarnya anggaran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah seperti pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.  
Rancangan Anggaran/ Biaya Penelitian

<b>Honor</b>					
Honor	Honor jam/minggu (Rp)	Waktu (Jam/minggu)		Total Jam	Honorarium / tahun
Ketua	30,000	6	jam/minggu	18	540,000
anggota	25,000	3	jam/minggu	9	225,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>					765,000
<b>Peralatan Penunjang</b>					
Material	Justifikasi pemakaian	Kuantitas		Harga satuan (Rp)	Harga peralatan Penunjang (Rp)
Mobil	Biaya Pembelian Bahan Bakar untuk mengumpulkan data	20	liter	10,000	200,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>					200,000
<b>Bahan Habis pakai</b>					
Material	Justifikasi pemakaian	Kuantitas		Harga satuan (Rp)	Harga peralatan Penunjang (Rp)
Pembelian kertas	Untuk pengetikan proposal penelitian dan hasil penelitian hasil	1	rim	45,000	45,000
Pembelian catridge	Untuk Proposal dan Hasil Penelitian	1	Buah	20,000	20,000
Pembelian Plashdish	Untuk Proposal dan Hasil Penelitian	1	Buah	75,000	75,000
Biaya cetak	Memperbanyak Proposal dan hasil Penelitian untuk ke LPPM	4	rangkap	50,000	200,000
Biaya penggandaan	Foto Copy data Untuk Perbanyak Bahan penelitian	150	lembar	250	37,500
Konsumsi	Konsumsi Perjalanan Ke lokasi Tempat Penelitian	2	Kali	150,000	300,000
laporan	Lain-lain (publikasi, seminar dan lainnya )	1	rangkap	600,000	600,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>					1,277,500
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)</b>					2,242,500

#### 4.2. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) seperti dalam table 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.  
Rancangan Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan		Jan - Maret 2023 ( Minggu)											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Pengumpulan data												
2	Pengolahan data												
3	Pengumpulan Bahan Penelitian												
4	Persiapan pembuatan Laporan penelitian												
5	Menyusun laporan penelitian												
6	Penyerahan Laporan Penelitian												

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Arif dan Heru Susilo, 2016. Pengaruh Pengetahuan Tentang Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang).
- Badriyyah Djula 2013 berjudul Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi Dosen Fak.Ekonomi dan Bisnis Univ.Neg.Gorontalo
- Bank Indonesia,2022 dataStatistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik 2022, Realisasi penerimaan hasil pengelolaan Indonesia dan PNBP Indonesia .
- Basri, 2005.Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan. Uang Luar Negeri. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fauzi, Ahkmad. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi.PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hastuti, 2018 Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomor 2 – November 2018 ISSN (print): 2598 - 0696 55 ( PNBP) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia.
- Irfan Nur Rachman 2016 Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Legal Policy of Natural Resources Management According to Article
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods)*. Bandung (ID) : Alfabeta.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara, Bandung : Fokusmedia.

